

Bank Dunia Nilai Infrastruktur Listrik Indonesia Mengkhawatirkan

Bank Dunia menilai kondisi sumber energi listrik di Indonesia saat ini mengkhawatirkan. Bank Dunia melihat infrastruktur listrik di Indonesia memang buruk sehingga investor enggan masuk karena tidak ada jaminan kecukupan pasokan energi untuk industrinya maupun kegiatan bisnis lainnya.

Demikian penilaian yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/5).

Steer mengatakan, buruknya kondisi infrastruktur listrik tersebut sebenarnya sudah diupayakan untuk diperbaiki oleh pemerintah. Namun hasilnya tetap saja belum memuaskan dan terus terjadi krisis energi seperti sekarang ini. Padahal, untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan waktu cepat. Karena pemerintah terbatas dananya, investasi belum bisa dilakukan.

Saat ini, kata Steer, yang perlu dilakukan dalam jangka pendek oleh Pemerintah Indonesia adalah membangun pembangkit baru dan repowering. Namun, untuk melakukan hal itu dibutuhkan investasi sekitar 24 miliar dollar AS. Investasi sebesar itu tidak akan mampu dipenuhi Pemerintah Indonesia maupun Bank Dunia. Bank Dunia sendiri tidak memiliki alokasi sebesar itu untuk Indonesia.

Menurut Steer, sebaiknya Indonesia memanfaatkan dana di sektor listriknya untuk merancang program yang bisa merangsang investor asing membangun infrastruktur listrik di Indonesia. Dengan demikian, masalah krisis listrik bisa diatasi dalam jangka panjang secara lebih pasti.

Saat ini, salah satu alasan kuat perusahaan besar tidak mau ekspansi pabriknya di Indonesia adalah mereka tidak yakin ada sumber listrik yang dapat diandalkan. "Jika pabrik harus membeli banyak cadangan generator, tentunya itu sangat berat. Sebab, beberapa perusahaan sangat membutuhkan alat pendingin dalam menyimpan produknya. Jadi, perbaikan pengadaan energi listrik merupakan masalah besar yang harus diselesaikan pemerintah untuk mendatangkan investasi," ujarnya.

Sebagai komitmen, Steer mengatakan, Bank Dunia akan memberikan bantuan pinjaman kepada Indonesia sebesar 140 juta dollar AS. "Bantuan ini sudah disepakati dengan Pemerintah Indonesia bulan ini. Rencananya bantuan pinjaman ini adalah untuk investasi peralatan distribusi listrik di Jawa dan Bali," katanya.

Bank Dunia rencananya akan memberikan bantuan pinjaman lebih besar lagi pada tahun 2004. Peningkatan pinjaman ini karena pada 2002 dan 2003 jumlah pinjaman yang dikucurkan kepada Indonesia masih kecil akibat peraturan desentralisasi yang belum jelas.

Tidak bisa dicegah

Status daya listrik Jawa-Bali berdasarkan laporan PLN, Selasa (27/5), tercatat masih terjadi defisit sebanyak 435 megawatt (MW). Defisit terjadi karena dari kapasitas daya terpasang sebesar 18.612 MW, hanya mampu dibangkitkan sebanyak 12.815 MW. Padahal beban puncak sebanyak 13.250 MW.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengakui, kondisi listrik di Indonesia saat ini memang buruk karena sedang mengalami gangguan. Namun, kondisi tersebut tidak bisa dicegah karena itu terjadi akibat gangguan alam.

Menurut Purnomo, seharusnya pembangkit PLN diharapkan mampu menyisakan cadangan

listrik sebesar 30 MW dalam kondisi normal. Namun, kenyataannya, saat ini PLN justru mengalami defisit pasokan sehingga terpaksa melakukan pemadaman secara bergilir.

Namun, menurut Purnomo, kondisi listrik yang buruk juga terjadi karena pola konsumsi listrik masyarakat yang menyulitkan pengaturan suplai pembangkit. Pelanggan menggunakan listrik pada beban puncak terlalu tinggi, sehingga terjadi selisih konsumsi yang sangat tinggi antara waktu pemakaian beban puncak dan beban rendah, yakni sebesar 800 MW.

Purnomo meminta pengusaha untuk membantu dengan mengurangi penggunaan listrik pada waktu beban puncak. Kondisi sekarang ini disebabkan situasi yang tak dapat dihindari sehingga harus diatasi secara bersama-sama.

Namun, Purnomo tetap mendesak PLN untuk segera memperbaiki pembangkitnya menyusul adanya defisit daya listrik 300 MW saat ini. Ini perlu dilakukan agar pemadaman bergilir di sistem pembangkit Jawa-Bali bisa diatasi segera.

Kelemahan manajemen

Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WG-PSR) Fabby Tumiwa mengatakan, pemadaman bergilir di Jawa-Bali menunjukkan kelemahan PLN dalam mengatur beban listrik dan sistem perawatan pembangkit.

Bila PLN memiliki peramalan beban yang andal, perencanaan dan sistem manajemen perawatan pembangkit yang baik, tindakan pemadaman bergilir tidak akan terjadi.

Menurut Fabby, sistem Jawa- Bali memiliki kapasitas terpasang 18.612 MW, dengan daya puncak hari Senin (26/5) mencapai 13.250 MW. Karena itu, menurut dia, seharusnya tersisa daya cadangan 5.362 MW.

Fabby mengemukakan, analisis WG-PSR yang menyimpulkan bahwa kondisi defisit daya listrik ini terjadi bukan karena daya listrik terpasang PLN kurang, melainkan karena PLN memiliki masalah dalam manajemen perencanaan dan pengaturan pemeliharaan.

“Seharusnya, jika pembangkit-pembangkit PLN dirawat dengan baik sebelumnya dan perawatan dilakukan secara bertahap, maka tidak semestinya PLN kehilangan 20 persen pasokan daya listriknya,” ujar Fabby.

WG-PSR juga menyebutkan, PLN sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik seharusnya merespons ancaman ini secara memadai sebab krisis sudah didengung-dengungkan selama tiga tahun. Salah satu alternatif yang mungkin diambil adalah dengan memanfaatkan daya captive yang potensinya mencapai 7.000 MW.

Oleh karena itu, WG-PSR meminta pemerintah membentuk tim independen guna menyelidiki ancaman krisis listrik yang dilansir oleh PLN. Pasalnya, masalah ini berdampak serius kepada upaya pemulihan ekonomi nasional.

DPR juga hendaknya memanggil pihak-pihak terkait untuk memberi keterangan dalam sebuah dengar pendapat publik sehingga masalah ini dapat dituntaskan secara transparan dan bertanggung jawab.

PLN berkewajiban memberi kompensasi yang signifikan kepada konsumen listrik yang dirugikan jika terjadi pemadaman.